



ບົຍນີຊຽງ ກູບາບີຊຽງ ຕາບີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕູງຊຽງບາງຊຽງກາທາຍີ ທາດກຽ
INSPEKTORAT DAERAH

ຕາບີຊຽງ ກູບາບີຊຽງ ຕາບີ ທາດກຽ ທາດກຽ ທາດກຽ (ບາງຊຽງ) ກູບາບີຊຽງ (ບາງຊຽງ) ທາດກຽ
 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
 Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI TH 2024

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
1	Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026.	Sekretariat	Inspektur	2024	v	v	2 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/renstra/
2	Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali atau yang disebut Ikhtisar Hasil Pengawasan merupakan hasil capaian kinerja selama 1 tahun yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali.	Sekretariat	Inspektur	2023	v	v	6 Bulan	https://inspektorat.baliprov.go.id/ikhtisar-hasil-pengawasan/
3	Survey Kepuasan Masyarakat	Berisi laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan secara periodik (Per Triwulan)	Sekretariat	Inspektur	2024	v	v	3 Bulan	https://inspektorat.baliprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat/
4	Laporan Kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023	Berisi laporan rekapitulasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2023	Sekretariat	Inspektur	2023	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/lhkpn-inspektorat/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
5	Laporan Kepatuhan Pelaporan LHKAN tahun 2023	Berisi laporan rekapitulasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara tahun 2023	Sekretariat	Inspektur	2023	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/lhkan/
6	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023	Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (<i>outcome</i>) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023	Sekretariat	Inspektur	2023	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/lkjp-inspektorat-daerah-provinsi-bali-tahun-2020/


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651231 198603 1 175



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Rincian Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat Jikadikecualikan
3	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Memuat dokumen hasil pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	Memuat dokumentasi hasil rapat yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 UU No.43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 44 	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Biodata ASN	Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data
6	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN	Memuat email, sso, LHKPN, LHKAN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data
7	Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	Memuat seluruh dokumentasi konfigurasi aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data



No	Rincian Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat Jikadikecualikan
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	Memuat dokumentasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
9	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dokumen surat yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
10	Dokumen Pengadaan, SPJ Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Dokumen pengadaan dan surat pertanggung jawaban belanja	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Terbatas sampai proses pengadaan selesai dan setelah pelaksanaan Audit selesai dilaksanakan	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651231 198603 1 175



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

